

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada definisi tersebut, UU Nomor 24 Tahun 2007 selain mendefinisikan mengenai bencana alam dan bencana nonalam, juga mendefinisikan bencana sosial berkaitan dengan sektor pariwisata. Lalu bencana sosial dapat berdampak signifikan pada ekosistem pariwisata dan pencapaian tujuan kinerja jika industri tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya sektor pariwisata, sektor tersebut sering dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan saat bepergian. Maka dari itu, bencana merupakan salah satu faktor yang sangat rentan terhadap fluktuasi permintaan pariwisata.

Dalam menghadapi bencana di Indonesia terutama di sektor pariwisata, kontribusi masyarakat sangatlah penting. Masyarakat merupakan pendukung utama daya kepemilikan dalam meningkatkan kesadaran diri dalam lingkungan yang sehat dan bersih untuk perilaku yang menopang kehidupan (Wahyu et al., 2020). Masyarakat itu sendiri adalah sebuah variabel pendukung modal sosial dalam bencana. Modal sosial didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari bencana (Soeparno, Koentjoro, 2020). Kekuatan masyarakat dalam membangun modal sosial, dapat menyatukan orang-orang di sekitar dengan pemahaman yang sama tentang masalah dan pencarian solusi (Handayani, 2020).

Menurut BNPB berdasarkan data 22 Juni 2021, tercatat ada 1.460 kejadian bencana di Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, gelombang pasang, karhutla, dan kekeringan, menurut data kejadian bencana. Namun, potensi ancaman lainnya, seperti perubahan iklim dan bencana geologi, menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Karena prosedur yang efektif, peta penguncian, dan instrumen peringatan dini telah dipasang di lokasi wisata sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan ini, pengelola maupun pengunjung sudah mengetahui tindakan yang harus segera dilakukan jika terjadi bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan obyek wisata yang digunakan dalam upaya penanggulangan. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman, yang akan membuat masyarakat lebih sering mengunjungi tempat wisata.

Adapun faktor yang rentan terhadap pariwisata, ini berhubungan dengan risiko dan kelemahan yang berupa membangun efek bencana yang merusak kehidupan dan pekerjaan daerah setempat. Bahkan jutaan orang menjadi miskin akibat dampak bencana pada fluktuasi pariwisata dengan penurunan kondisi sosial ekonomi. Mitigasi faktor terhadap sektor pariwisata ini perlu ditingkatkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pemerintah untuk meningkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya ekonomi merupakan suatu hal yang harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Serta kesejahteraan masyarakat ini bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut (Paramita *et al.*, 2018). Dengan adanya kondisi tersebut, kondisi alam yang dialami ini berkaitan dengan peningkatan Desa Wisata aman dari bencana.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Gunungkidul yang dimana didaerah ini banyak tempat wisata alam yang indah. Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus aman dari bencana. Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki kekayaan alam dan budaya masyarakatnya yang cukup potensial untuk dijadikan tempat wisata sebagai penambah wawasan masyarakat luar. Hingga saat ini, tempat wisata yang ada di Gunungkidul terus bertambah karena adanya potensi dari kontur alam yang indah, baik pantai, pegunungan, perbukitan, maupun tradisi dan budaya masyarakatnya. Potensi yang dimiliki pariwisata di Gunungkidul sendiri berupa biota laut dan keindahan alamnya. Dengan adanya keindahan alam tersebut, terdapat ancaman berupa bencana alam, jika pengelolaan pariwisata tersebut tidak optimal terhadap sarana dan prasarana yang meningkatkan risiko terjadinya bencana (Pahleviannur *et al.*, 2020). Serta menurut dari website (Aini, 2022) Kabupaten Gunungkidul sendiri merupakan daerah yang rawan dari bencana alam. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pendukung infrastruktur pengurangan risiko bencana. Kurangnya fasilitas pendukung, sumber daya manusia didedikasikan untuk pengurangan risiko bencana serta kelembagaan yang didedikasikan untuk pengurangan risiko bencana yang belum ada di tingkat desa, sehingga kurang terintegrasi dalam manajemen risiko bencana.

Dengan adanya daerah rawan bencana di Gunungkidul, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut di Gunungkidul. Peneliti menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul, karena adanya ketertarikan peneliti pada pengembangan potensi alam dengan pariwisata di kabupaten ini. Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki beberapa desa wisata dimana desa wisata merupakan desa yang dibangun oleh pemerintah langsung dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas pariwisata desa dan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengelola desannya untuk memajukan dan menjadikan potensi desa. Salah satunya seperti desa bejiharjo adalah salah satu desa yang memiliki banyak potensi yang berhasil membentuk obyek wisata baru dan merupakan

salah satu fenomena sosial yang ada di Gunungkidul dan desa ini merupakan desa wisata terbaik yang dinyatakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012.

Risiko bencana yang berada di Gunungkidul memetakan potensi rawan bencana pohon tumbang, tanah longsor, dan banjir. Pada tanggal 18 November tahun 2022, menurut (Yuwono, 2022) bencana yang terjadi di Gunungkidul berupa ancaman banjir dan longsor. Adanya 1.746 warga yang terdampak banjir dan longsor di Gunungkidul tersebut mengalami dampak bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Munculnya bencana tersebut, karena pengaruh cuaca yang ekstrem yang bisa berdampak pada kondisi tersebut. Dengan adanya bencana yang melanda di Gunungkidul, ini dapat mempengaruhi pengelolaan terhadap desa wisata yang berada di daerah itu sendiri. Serta pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan baik dari segi potensi serta ancaman bencana. Dengan adanya potensi daerah tersebut, masyarakat setempat dan dukungan pemerintah sangat berpengaruh sebagai *stakeholder* (Ilham & Arfin, 2019).

Peran *stakeholder* disini sebagai membangun infrastruktur, mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan sektor pariwisata. Pelaksanaan pembangunan sumber daya merupakan peran penting dalam *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan pariwisata. Sedangkan desa wisata di Gunungkidul mengalami masalah yang perlu diatasi oleh *stakeholder* bahkan pemerintah. Permasalahan tersebut meliputi, dampak curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir. Menurut (Kurniawan, 2022) BPBD Gunungkidul dan Kepala Pencegahan menyatakan bahwa keindahan alam yang ada pada destinasi wisata di Gunungkidul menyimpan potensi bencana seperti angin kencang yang merusak banyak rumah warga, longsor dan banjir.

Dibalik keindahan alam yang ada di Gunungkidul, terdapat 46 desa wisata rawan bencana berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPBD di Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong. Hal ini terjadi karena berada di kawasan perbukitan yang dijadikan pemukiman sehingga kawasan tersebut rawan longsor ketika curah hujan tinggi. Selain itu untuk kawasan yang rawan banjir dan tsunami berada di Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus hingga Girisubo. Kemudian BPBD sudah menyatakan bahwa terdapat 56 desa wisata tangguh bencana (Ivan, 2019).

Hal tersebut menjadi ancaman bagi ribuan penduduk Gunungkidul, salah satunya di desa Bejiharjo yang tidak lama terkena bencana di tahun 2022. Desa Bejiharjo merupakan desa wisata yang berada di kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yang baru-baru saja terkena banjir. Hal ini disebabkan karena hujan lebat yang melanda daerah tersebut tak tertampung sehingga air sungai yang ada di desa tersebut meluap dan menggenangi jembatan yang biasa digunakan oleh warga setempat. Bencana banjir ini juga mengakibatkan dua siswa SMK di Gunungkidul terseret oleh arus yang deras saat ingin menyebrangi jembatan yang digenangi oleh sungai yang meluap (Priyatno, 2022). Kemudian dari website (Theophilus Yanuarto, 2022) terjadi angin kencang di kecamatan Semanu yang menyebabkan 510 rumah warga rusak dari tingkat yang ringan sampai yang terberat.

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa terjadinya bencana alam seperti banjir, diakibatkan oleh air dari hujan lebat yang tidak tertampung dengan baik. Banjir dan angin kencang sendiri merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh manusia, efek yang ditimbulkan juga tidak dapat diperbaiki secara instan baik dari segi ekonomi maupun material, tetapi bencana ini masih bisa dicegah dengan cara lain agar tidak menimbulkan efek yang besar. Sehingga jika

tidak diatasi dengan benar bisa memperbanyak korban dan dapat meningkatkan potensi bencana yang ada.

Menurut data (Tribun Jogja, 2022) masalah desa wisata yang mengalami dampak banjir mulai dari tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terkena dampak banjir

No	Desa Wisata	Bencana	Waktu
1.	Ngawen	Sungai Oya yang meluap	18-11-2022
2.	Semin	Rumah terendam luapan sungai	18-11-2022
3.	Dusun Pucung Pangkah	Jalan yang tidak bisa dilalui	18-11-2022
4.	Bendol, Candirejo	Rumah yang tertimpa pohon	18-11-2022
5.	Widoro Kidul	Jalur yang tidak bisa dilalui dan terendam banjir	18-11-2022
6.	Pucung	Jembatan putus	18-11-2022
7.	Blembem	Tanah longsor	18-11-2022
8.	Watukelir Semin	Air yang meluap akibat banjir	18-11-2022
9.	Gluntung, Patuk	Pohon yang tumbang	18-11-2022
10.	Karangmojo	Pohon yang tumbang	18-11-2022

Sumber: Irawan, 2022

Dari bencana yang terjadi di 10 kecamatan tersebut, terdapat 1.746 jiwa yang terdampak banjir dan longsor, 2 diantaranya menjadi korban karena tertimbun oleh longsor (Budi Cahyana, 2022). Mitigasi yang sudah dilaksanakan menurut (Saraswati, 2021) BPBD berencana menambah desa tangguh bencana (Destana), serta hal ini merupakan bentuk dari mitigasi bencana. BPBD tersebut membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan mengurangi dampak dari kebencanaan. Kemudian menurut (Junianto, 2022) BPBD berkomitmen untuk meningkatkan mitigasi berupa forum pengurangan resiko bencana, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi, bersosialisai ditempat wisata tentang penanggulangan bencana dan meng-*update* data kebencanaan di media sosial.

Kemudian hal penting yang menjadi tekanan dalam mitigasi didesa wisata bagi masyarakat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait optimalisasi wisata, pengurangan resiko bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal penting lainnya adalah mendorong masyarakat untuk memahami dan aksi sehingga masyarakat memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan dan pengalaman dalam program optimalisasi desa wisata dan pengurangan resiko bencana. Aksi yang dilakukan tentang optimalisasi potensi wisata berupa penataan lokasi wisata, selain itu aksi yang terkait dalam program pengurangan resiko bencana seperti pembersihan drainase dan lingkungan desa wisata kemudian berupa penghijauan yang mendukung perkembangan desa wisata di Gunungkidul.

Gambar 1.1 Data Kebencanaan DIY Tahun 2022



Sumber: BPBD Gunungkidul, 2022

Dari data kebencanaan DIY Tahun 2022, bisa dilihat bahwa di daerah Gunungkidul terjadi 49 kali angin kencang, 2 kali terjadi pandemi/epidemi, 147 kali tanah longsor, 762 kali gempa tidak terasa, 9 kali gempa terasa, 18 kali banjir dan 23 kali terjadi kebakaran pemukiman. Total kejadian yang menimpa kabupaten Gunungkidul terhitung sebanyak 1.010 kejadian. Akibat bencana

tersebut, terjadi banyak kerusakan seperti infrastruktur, rumah, bangunan tergenang, fasilitas umum, tempat usaha, jaringan listrik, telepon, internet yang terhambat, kandang hewan, pohon tumbang, kendaraan dan terdampak sebanyak 6.624 jiwa.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan karena berkaitan dengan usaha BPBD Gunungkidul dalam mengurangi resiko bencana tersebut. Dimana bencana yang ada didesa tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga setempat. Maka penelitian ini lebih mengambil kasus penanganan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul, karena dalam kasus ini bencana alam yang lain bisa saja akan muncul dan menimbulkan dampak yang lebih besar jika tidak dipersiapkan untuk mengurangi resikonya. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait **“Desain Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dalam meningkatkan Desa Wisata Aman Bencana di Kabupaten Gunungkidul”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya ancaman bagi para penduduk di Gunungkidul seperti tingkat keamanan yang kurang menjamin, hal ini dapat merugikan masyarakat baik dari segi material maupun non material, maka dari itu peneliti merumuskan masalah bahwa standar tingkat keamanan didesa wisata yang ada di Gunungkidul belum 100% menjamin keamanan para pengunjung. Serta di dalam permasalahan tersebut, kurangnya fasilitas pendukung infrastruktur yang menjadi risiko bencana yang sangat berdampak pada kehidupan di desa wisata. Hal itu dapat menurunkan minat para wisatawan karena kurangnya keamanan pada saat berwisata di Gunungkidul. Hujan yang lebat dapat menjadi banjir karena adanya luapan air yang tidak tertampung. Maka dari sinilah penelitian ini mengajukan pertanyaan Bagaimana Desain Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Desa Wisata Aman Bencana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan Desain Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dalam meningkatkan Desa Wisata Aman Bencana di Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan dibidang kebencanaan di berbagai tempat terutama ditempat wisata, khususnya tentang mitigasi bencana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan evaluasi diri kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang mitigasi bencana bagi masyarakat diberbagai tempat terutama di desa wisata Gunungkidul. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai pertimbangan saran bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan komunikasi bencana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan masyarakat agar mengetahui bagaimana desain mitigasi bencan BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi bencana.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian menggunakan literature review yang relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan literature review bertujuan untuk menemukan sisi yang menarik dalam penelitian dan mengklasifikasikan perbedaan yang sedang dilaksanakan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 30 artikel jurnal tentang keamanan desa wisata terhadap bencana dari tahun 2014-2022.

Terdapat 2 artikel membahas mengenai keamanan desa wisata dari sudut pandang dampak pada pengembangan desa wisata terhadap bencana. Penelitian dari Sudarmadji dan Darmakusuma

Darmanto (2014) menjelaskan bahwa dampak pada pengembangan desa wisata sendiri yaitu Masyarakat setempat mendapatkan banyak manfaat dari aspek ekonomi dari pengembangan Desa Wisata Alam, yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan di Desa Wisata Sambi. Peluang usaha dan lapangan pekerjaan bertambah banyak dengan dikembangkannya Desa Wisata Sambi. Dampak positif berupa peningkatan pendapatan serta peluang berusaha timbul, tetapi di sisi lain juga timbul dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Lunturnya budaya lokal juga dapat terjadi di saat yang akan datang. Selain itu, risiko bencana dari aktivitas Merapi juga mungkin terjadi di Desa Wisata Sambi. Dari sisi potensi pariwisata dan lingkungannya Desa Wisata Sambi mempunyai prospek pengembangan yang baik, tetapi dalam pengembangannya harus diperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana yang dihadapi. Namun temuan tersebut kontra dengan temuannya Elyawati dan Noor Fatmawati (2021) bahwa Kerusakan hutan merupakan berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi (Triana, 2017). Kerusakan hutan di Indonesia masih banyak terjadi bahkan hampir terjadi di seluruh hutan di Indonesia. Kerusakan hutan di Indonesia terjadi karena adanya illegal logging, kebakaran hutan, adanya serangan hama dan penyakit, dan perambahan hutan. Bukan hanya merugikan masyarakat, kerusakan hutan juga mengakibatkan berbagai kesenjangan sosial, banjir bandang, dan erosi tanah.

Kemudian terdapat 2 artikel yang membahas dari sudut pandang Mitigasi Bencana. Penelitian dari Setiawan Priatmoko, Yitno Purwoko dan Anwani (2019) menyatakan bahwa Pemahaman tentang mitigasi bencana yang dimiliki oleh warga lokal pengelola CBT telah membawa peningkatan kualitas kawasan yang cukup signifikan. Standar-standar higienitas, pelestarian nilai-nilai lokal, dan pengurangan resiko atas kejadian bencana yang diterapkan

membuat kawasan tersebut menjadi lebih baik. Bahkan dengan pemahaman mitigasi bencana ini dapat mengurangi nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tabu (pamali) bagi masyarakat ketika membicarakan kemungkinan adanya bencana. Temuan tersebut sejalan dengan penemuan Rahmat Ingkadijaya dan Purwanti Dyah Pramanik (2019) bahwa pelatihan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kebermanfaatan pelatihan manajemen resiko baik dari aspek *Reaction Level*, *Learning Level*, dan *Behaviour Level*. Pada *Reaction Level* rata-rata masyarakat merasa setuju dengan kebermanfaatan materi yang disampaikan. Sedangkan pada *Learning Level* menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat merasa setuju untuk belajar lebih lanjut mengenai manajemen resiko di desa Cikolelet. Pada *Behaviour Level* menunjukkan bahwa masyarakat setuju untuk menerapkan pengetahuan mengenai manajemen resiko yang telah disampaikan diuntuk Desa Wisata Cikolelet.

Kemudian terdapat 8 artikel yang membahas dari sudut pandang Pembangunan. Penelitian dari Tri Risandewi (2017) menjelaskan bahwa Sesuai hasil analisis SWOT, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan desa wisata Candirejo terkait infrastruktur akses jalan antara lain: kedekatan jarak desa Candirejo dengan destinasi utama, kondisi jalan sebagian besar sudah baik, telah ada jalan penghubung antar dusun, namun belum ada marka jalan, kurangnya lebar jalan, kondisi jalan penghubung antar dusun masih berupa makadam dan jalan tanah, serta drainase yang kurang memadai. Sedangkan peluang dan ancaman pada infrastruktur akses jalan antara lain: dukungan program dari pemerintah provinsi, kebijakan nasional terkait ADD, budaya gotong royong masyarakat, ketertarikan wisatawan mancanegara pada pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan namun belum ada kerjasama antar desa dalam penyediaan dan pemeliharaannya serta potensi terjadinya bencana alam. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Binti Muti'atul Atifah, Abdillah Hanafi, Andhika Ananda Wijaya, Luqman

Nurhuda, Radite Wanudya Apsari, Ferriyati Masitoh (2022) yang menjelaskan bahwa Kondisi fisik dan sosial merupakan komponen penting dalam perencanaan suatu wilayah. Desa Punjul memiliki beberapa permasalahan pada kondisi fisiknya seperti terdapat beberapa titik yang rawan mengalami tanah longsor dan infrastruktur yang kurang memadai, sedangkan dalam kondisi sosial sejauh ini belum dijumpai permasalahan yang kompleks. Jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terbatas juga masih menjadi permasalahan di Desa Punjul. Pembangunan di Desa Punjul menggabungkan atau mengaitkan kondisi fisik dengan sosialnya sehingga kedua nilai tersebut masih saling berkaitan. Dengan memahami karakter wilayah, Desa Punjul memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata terutama ekowisata. Kondisi alam yang masih hijau menjadi salah satu nilai lebih dari Desa Punjul. Temuan tersebut juga sejalan dengan temuannya Mochammad Arfani (2022) yang menjelaskan bahwa Melakukan kolaborasi pentahelix, masyarakat memperoleh bantuan pengetahuan tentang kebencanaan dan cara mengurangi risiko bencana yang terjadi sehingga masyarakat mempunyai gambaran preventif tentang bencana. Demikian juga masyarakat yang berkunjung di kawasan wisata desa Kalangnyar mempunyai pengetahuan dan langkah-langkah yang perlu diambil seandainya terjadi bencana, karena di daerah wisata sudah ada petunjuk dan arah jalur evakuasi yang ada di jalan-jalan protokol di desa wisata Kalangnyar.

Temuan tersebut berbeda dengan temuannya Vina Salviana Darvina Soedarwo, Muhammad Hayat, dan Ratih Yuliati (2022) yang menjelaskan bahwa Dalam membangun desa Wisata Tangguh di Pujon Kidul berbasis modal sosial yaitu (1) menerapkan norma protokol kesehatan dalam semua aktifitas yang melekat pada kegiatan kepariwisataan desa agar trust dari masyarakat tetap terjaga. (2) nilai yang disepakati bersama dalam teamwork pengelola desa wisata agar tetap dalam kebersamaan (menjaga motivasi tinggi) walau dalam kondisi memprihatinkan (3)

membangun sinergi dengan mitra desa (*networking*) melalui pelibatan *team work* yang solid. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Novi Irawati dan Evrita Lusiana Utari (2022) yang menjelaskan bahwa desa wisata Cacaban Kidul sudah mengalami perkembangan yang lebih baik. Berkat adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat, para akademisi beserta pemerintah, hal ini terlihat dengan penambahan berbagai fasilitas penunjang wisata yang dikembangkan sebagai penguatan daya tarik, adanya beberapa penambahan fasilitas sarana prasarana pariwisata dan juga aksesibilitas menuju kawasan ini yang sudah dibangun. Temuan ini sejalan dengan temuannya Tundjung Wahadi Sutirto, Supriadi (2017) yang menjelaskan bahwa berdasarkan kegiatan awal yang telah dilakukan berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Desa Berwawasan Go Green di Kawasan Gunung Lawu utamanya bagi LMDH Wana Tirta dan LMDH Daun Mulia dapat direkomendasikan beberapa hal, yakni perlunya meningkatkan kehijauan desa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan pedesaan Gunung Lawu melalui penanaman tanaman berkayu yang berfungsi ganda, baik sebagai tanaman penghijauan maupun tanaman yang bisa menghasilkan buah, seperti buah alpukat, membangun kebersamaan dalam rangka memelihara lingkungan kawasan pegunungan sehingga terbangun komitmen sungguh-sungguh dari seluruh warga untuk melakukan penghijauan bersama, mensinergikan pengelolaan lingkungan hidup dengan program pengembangan desa wisata di Desa Anggrasmanis.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan Rahmat C. Wibowo, Karyanto, Ahmad Zaenudin, Muh. Sarkowi (2020) juga masih sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penerapan teknik pemetaan partisipatif untuk pemetaan sumber daya desa dengan melibatkan narasumber yang berkompeten di lingkungan desa dapat melengkapi teknik pemetaan konvensional guna menghasilkan produk peta sumber daya desa yang lebih komprehensif. Berbagai informasi spasial yang tersimpan dalam mental map narasumber dapat diterjemahkan dalam obyek spasial, termasuk

informasi - informasi yang sulit diperoleh menggunakan teknik pemetaan konvensional, seperti misalnya titik kumpul. Temuannya juga masih sejalan dengan temuan Rahmat C. Wibowo, Kelik H. Basuki, Muh. Sarkowi (2020) yang menjelaskan bahwa Pemetaan partisipatif berbasis SIG adalah pendekatan dan metode alternatif untuk menjembatani berbagai bentuk pemetaan partisipatif. Kelebihan dari metode ini adalah mampu menghimpun informasi dari masyarakat lokal untuk kemudian menjadi bahan masukan dalam proses pengolahan data secara digital. Adapun kekurangannya adalah belum dapat mengakomodasi peran mandiri dari masyarakat untuk memetakan secara digital, sehingga membutuhkan pendamping atau fasilitator yang memahami konsep SIG.

Kemudian, terdapat 18 artikel yang membahas dari sudut pandang strategi. Penelitian dari Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo (2014) menjelaskan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat yaitu bertani yang menjadi ciri khas Desa Bandungan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan desa wisata yang berbasis agrowisata yang memiliki atraksi wisata lain yaitu mempelajari cara memelihara sapi khusus karapan sapi dan sapi sono dan juga mempelajari cara membatik menggunakan alat tradisional yang kemudian konsep pengembangan secara spasial terbagi menjadi tiga, yaitu menyediakan rute perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan desa wisata yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Bandungan, menyediakan sarana transportasi khusus untuk menuju kawasan desa wisata untuk mempermudah wisatawan berkunjung kawasan desa wisata dan menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan wisata. Temuan tersebut berbeda dengan temuannya Tyas Kusumah Admaja (2020) yang menjelaskan bahwa Kapasitas sumber daya manusia pengelola desa wisata dan masyarakat relatif masih lemah dari sisi kemampuan manajemen dan layanan wisata. Kemudian dari aspek partisipasi

masyarakat dalam kegiatan wisata desa secara umum sudah baik, namun koordinasi masih belum secara intens dilakukan.

Temuan tersebut kontra dengan temuannya Nida Sayyidatul Izza , Heri Tjahjono (2019) yang menjelaskan bahwa Pengetahuan masyarakat mengenai tanah longsor sebagian besar berada pada kriteria sangat tinggi (44%) dan tinggi (51%). Faktor yang menyebabkan adalah kemajuan teknologi yang dibawa oleh wisatawan. Akses informasi yang semakin mempermudah masyarakat dalam mencari tahu berbagai hal. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Ilsa Haruti Suryandari (2019) yang menjelaskan bahwa struktur organisasi pengelola obyek wisata disusun dengan sederhana. Selain itu, sumber daya manusia diperoleh dari warga masyarakat sekitar. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pengelola sudah mampu mengidentifikasi biaya tetap dan variabel dalam pengelolaan obyek wisata serta menyusun anggaran sederhana. Namun temuan tersebut berbeda dengan temuan Yosephine Elisabeth Pasaribu dan Lastiani Warih Wulandari (2021) yang menjelaskan bahwa Desan Nglanggeran yang berlokasi di wilayah Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta merupakan desa yang masih memegang beberapa kearifan pola hidup sehat (wellness) dalam kehidupan keseharian masyarakatnya. Pola-pola kearifan wellness masyarakat ini mencerminkan perwujudan dan dapat diadaptasi kedalam penerapan protokol CHSE untuk Desa Wisata.

Temuan tersebut juga berbeda dengan temuan Kiki Rizki Makiya, Shilfi Arizona (2021) yang menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Wisata Candran telah memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan inovasi untuk mengelola sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan mempraktekan dan mengelola hasil pertanian dan peternakan yang dipermentasi, masyarakat semakin faham tentang prakter pertanian yang berkelanjutan itu apa. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Muhammad Sulthan dan Septiawan Ardiputra (2021) yang menjelaskan bahwa

Penyuluhan pariwisata desa wisata sangat diperlukan bagi warga desa Pamboborang hal ini dimaksudkan untuk membuka wawasan masyarakat desa, menambah pengetahuan akan manfaat yang di dapatkan jika desanya menjadi desa wisata banyak dampak yang akan di dapatkan, yang pasti dampak ekonomi, pendapatan akan meningkat kesejahteraan pun ikut meningkat. Temuan tersebut juga sejalan dengan temuannya Muhamad Muhamad dan Slamet Widiyanto (2019) yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan KKN dan Pengembangan Desa binaan adalah bagian dari modal sosial (*aset sosial*) yang merupakan modal dasar yang berkaitan dengan keterlibatan atau keikutsertaan suatu pihak dalam merespon atau menanggapi bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Triana Ahdiati (2022) yang menjelaskan bahwa Meskipun Pokdarwis PIW telah membuat satu blog resmi sebagai media sosialnya yang dikelola secara terorganisasi dan diberi nama Pantai Indah Widarapayung (PIW) pada tahun 2017, namun blog tersebut belum bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya. Artinya, masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui studi banding ke Desa Ekowisata Nglanggeran, maka bentuk media sosial yang cocok untuk Pokdarwis PIW dengan kondisi terkini adalah media blog dengan menggunakan layanan situs wordpress.

Temuan tersebut sejalan dengan temuan Sapto Nugroho, I Nyoman Sukma Arida, I Nyoman Jamin Ariana (2021) yang menjelaskan bahwa Terbangun pola relasi khas antara pengunjung Gunung Agung dengan pengusaha pariwisata dalam konteks pengungsian di Desa Wisata Kerta. Pola relasi yang terbangun berbasis setting ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan setting ekonomi pola interaksi yang terjadi adalah ekonomi agraris semi produktif; selanjutnya, berdasarkan setting sosial adalah solidaritas mekanis; dan, terakhir, berdasarkan setting budaya adalah kuasi patron-client. Ditemukannya Model Kolaboratif Stakeholder

Pariwisata dalam Konteks Bencana Erupsi. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Yusril Ihza Mahendra, Sri Apriani Puji Lestari, Agus Kurniawan (2021) yang menjelaskan bahwa Dengan membangun desa wisata selain fisik bangunan menjadi lebih baik, sarana prasana akan meningkat dan juga tentunya masyarakat akan lebih maju karena diberdayakan juga melalui pelatihan. Konsep desa wisata dapat membantu peningkatan taraf perekonomian setelah terkena bencana, mengatasi masalah perkotaan lainnya seperti mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan juga mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Temuan tersebut berbeda dengan temuannya Diah Pujiastuti, Isnanto (2022) yang menjelaskan dari sisi kesehatan bahwa pengaruh implementasi pelaksanaan protokol kesehatan sangat berperan dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 di area wisata. Perlu dilakukan beberapa hal terkait dengan kesiapan area wisata dalam menjalankan kegiatan pariwisata dengan komitmen bersama untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19. Temuan tersebut tidak sejalan dengan temuannya Ramlan, Nurul Hakim, Muhammad Yusrizal, dan Fajriawati (2018) yang menjelaskan tentang potensi ekowisata bahwa optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kerlang masih mengalami hambatan, yaitu karena pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah kurangnya perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, dan tidak adanya instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau.

Temuan tersebut berbeda dengan temuannya Firman Syah (2017) yang menjelaskan bahwa Strategi yang tepat dalam mengembangkan desa wisata di Indonesia adalah melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan lain yang menjadi identitas kemudian menjadi satu konsentrasi destinasi wisata

tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan. Temuannya tidak sejalan dengan temuan Tri Putri Rahmatillah, Osy Insyah, Nurafifah, Fariz Primadi Hirsan (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat permasalahan mendasar berupa pelayanan sarana dan prasarana yang belum maksimal serta keberadaan kodarwis yang harus ditingkatkan lagi. Selain itu, di Desa Sangiang masyarakat setempat sudah ikut berperan dalam pengembangan desa wisata dilihat berdasarkan keterbukaannya dalam menerima wisatawan. Adapun strategi pengembangan Desa Wisata Sangiang yang bertujuan mendukung kegiatan pariwisata Desa Sangiang yaitu peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana, menjaga dan melestarikan potensi wisata, meningkatkan promosi wisata, dan mengemas seluruh potensi wisata menjadi kesatuan paket wisata. Temuan tersebut sejalan dengan temuannya Kartika Fajar Nieamah, Noviana Utami, Arief Fiddienika (2018) yang menjelaskan bahwa Desa wisata Gunungkidul memiliki SDM yang berlisensi namun harus banyak mendapatkan kemampuan terutama kefasihan dalam berbahasa asing. Aksesibilitas menuju desa wisata cukup baik, jalan menuju desa wisata dapat dilalui berbagai jenis kendaraan serta plang petunjuk arah menuju berbagai desa wisata cukup jelas. Promosi yang dilakukan di desa wisata Gunungkidul masih belum terkonsep. Desa wisata masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut.

Temuan tersebut juga masih sejalan dengan temuannya Hanifa Fitrianti (2014) yang menjelaskan bahwa Upaya memberdayakan masyarakat yaitu Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha pada lokasi objek wisata. Alternatif strategi yang ditawarkan melalui analisis yang dilakukan menggunakan alat analisis SWOT digunakan untuk pengembangan Desa Wisata Talun. Temuan tersebut juga sejalan dengan temuannya Akhmad Asrofi, Su Ritohardoyo dan Danang Sri

Hadmoko (2017) yang menjelaskan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat desa dikategorikan dalam bentuk 3 adaptasi, yaitu (1). Strategi secara fisik. Ini dilakukan masyarakat Desa Bedono dengan cara meninggikan bangunan rumah yang ditinggali, mengubah bentuk rumah menjadi bentuk panggung, membuat pengaman bambu di sepanjang jalan dan menempatkan dokumen-dokumen di tempat yang tinggi. (2). Strategi secara ekonomi. Ini dilakukan oleh warga Desa Bedono dengan cara mengubah mata pencaharian yang sebelumnya berprofesi sebagai petambak alih profesi sebagai penjual makanan, pengojek, tukang parkir dan berbagai macam pekerjaan kasar lainnya. (3). Strategi adaptasi secara sosial. Ini dapat dilihat pada kegiatan hajatan, kegiatan keagamaan dan proses pemakaman warga Desa Bedono. Table 1.2 menampilkan pengelompokan 30 artikel jurnal yang dijadikan literature review dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

No.	Klasifikasi Tema	Hasil Penelitian
1.	Dampak Lingkungan Pengembangan Keamanan Desa Wisata Terhadap Bencana	(Sudarmadji dan Darmakusuma Darmanto, 2014), (Elyawati dan Noor Fatmawati, 2021) menjelaskan bahwa Masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari aspek ekonomi dari pengembangan Desa Wisata Alam, yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan dan peluang usaha dan lapangan pekerjaan bertambah banyak. Namun dampak negatifnya sendiri yaitu kerusakan hutan karena penggundulan dan alih fungsi lahan hutan.
2.	Mitigasi Bencana Untuk Keamanan Desa Wisata	(Setiawan Priatmoko, Yitno Purwoko dan Anwani, 2019), (Rahmat Inkgadijaya dan Purwanti Dyah Pramanik, 2019)

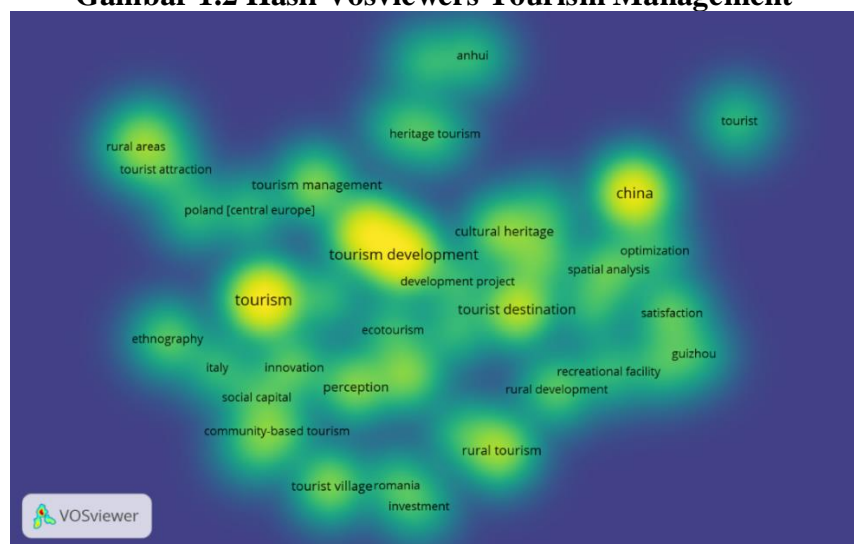
		Menjelaskan bahwa pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat membawa banyak manfaat bagi masyarakat serta peningkatan kualitas Kawasan yang cukup signifikan.
3.	Pembangunan untuk Keamanan Desa Wisata Terhadap Bencana	(Tri Risandewi, 2017), (Binti Muti'atul Atifah, Abdillah Hanafi, Anhdika Ananda Wijaya, Luqman Nurhuda, Radite Wanudya Apsari, Ferriyati Masitoh, 2022), (Mochammad Arfani, 2022), (Vina Salviana Darvina Soedarwo, Muhammad Hayat, dan Ratih Yuliati, 2022), (Novi Irawati dan Evrita Lusiana Utari, 2022), (Tundjung Wahadi Sutirto, Supriadi, 2017), (Rahmat C. Wibowo, Karyanto, Ahmad Zaenudin, Muh. Sarkowi, 2020), (temuan Rahmat C. Wibowo, Kelik H. Basuki, Muh. Sarkowi, 2020) Menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di desa wisata perlu di perhatikan, selain itu penghijauan juga diperlukan untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi.
4.	Strategi Dalam Menanggulangi Bencana	(Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo, 2014), (Tyas Kusumah Admaja, 2020), (Nida Sayyidatul Izza, Heri Tjahjono, 2019), (Ilsa Haruti Suryandari 2019), (Yosephine Elisabeth Pasaribu dan Lastiani Warih Wulandari, 2021), (Kiki Rizki Makiya, Shilfi Arizona, 2021), (Muhammad Sulthan dan Septiawan Ardiputra, 2021), (Muhamad Muhamad dan Slamet Widiyanto, 2019), (Triana Ahdiati, 2022), (Sapto Nugroho, I Nyoman Sukma Arida, I Nyoman Jamin Ariana, 2021), (Yusril Ihza Mahendra, Sri Apriani Puji Lestari, Agus Kurniawan, 2021), (Diah Pujiastuti, Isnanto, 2022), (Ramlan, Nurul Hakim, Muhammad Yusrizal, dan Fajriawati, 2018), (Firman Syah, 2017), (Tri Putri Rahmatillah, Osy Insyah, Nurafifah, Fariz Primadi Hirsan, 2019), (Kartika Fajar Nieamah, Noviana Utami, Arief Fiddienika, 2018), (Hanifa Fitrianti, 2014), (Akhmad Asrofi, Su Ritohardoyo dan Danang Sri Hadmoko, 2017). Menjelaskan bahwa strategi yang telah dilakukan sudah cukup baik seperti penyediaan sarana dan prasarana, penanaman pohon bakau guna mencegah bencana, analisis SWOT, serta bangunan yang di perkokoh, sehingga hanya perlu peningkatan potensi-potensi SDM yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yang mana 2 artikel jurnal membahas tentang Dampak Lingkungan Pengembangan Keamanan

Desa Wisata Terhadap Bencana. 2 artikel jurnal membahas tentang Mitigasi Bencana Untuk Keamanan Desa Wisata. 8 arikel jurnal membahas tentang Pembangunan untuk Keamanan Desa Wisata Terhadap Bencana. 18 artikel jurnal membahas tentang Strategi Dalam Menanggulangi Bencana. Namun dari empat topic tersebut belum ada secara komprehensif penelitian yang menjelaskan mengenai Desain Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dalam meningkatkan Desa Wisata Aman Bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan software vosviewer untuk menampilkan literature review. Vosviewer dipergunakan untuk menampilkan kebaharuan penelitian, pada literature review ini menggunakan sebanyak 30 artikel jurnal yang mana diambil dari 8 tahun terakhir. Berikut bibliometrik dari jurnal-jurnal yang telah saya olah melalui software vosviewer:

Gambar 1.2 Hasil Vosviewers Tourism Management



Sumber: VOSviewers

Berdasarkan gambar yang telah saya sajikan diatas bahwa keyword berwarna kuning menandakan banyaknya penelitian yang menyongsong tema tersebut, namun sebaliknya jika keyword berwarna hijau maka memiliki peluang untuk di teliti. Untuk keyword *feedback tourism*,

tourism development, china and rural areas berwarna kuning berarti menandakan jika sudah banyaknya penelitian sebelumnya. Sedangkan *tourist attraction, tourism management, ethnography, rural development, spatial analysis, cultural heritage, heritage tourism, development project* berwarna hijau berarti menandakan jika belum banyaknya penelitian. Bisa dikatakan bahwa pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan keyword “*tourism management*” sebagai bahan penelitian.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Mitigasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam jurnal yang dijelaskan oleh (Kodar, 2020) bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kemudian, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (PRB-BM) merupakan suatu kegiatan penyadaran dan kesiap-siagaan masyarakat dalam mengidentifikasi ancaman bencana dan Menyusun rencana aksi setempat untuk mengurangi risiko bencana dan secara umum dipahami sebagai pengembangan dan penerapan secara luas dari kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, dan praktik-praktik untuk meminimalkan kemungkinan dan risiko bencana di sekelompok masyarakat (Pramono & Yusuf, 2015).

Menurut Hardoyono dalam jurnal yang dikutip oleh (Permana Putri & Aisyah, 2021) mengatakan bahwa respon masyarakat dalam konteks manajemen bencana alam, sangat penting

untuk dipahami. Respon merupakan tahap awal dari strategi adaptasi dari masyarakat yang didapatkan melalui pemahaman tentang bencana alam yang terjadi. Pemahaman yang didapatkan masyarakat berupa pengetahuan dalam sikap dan tindakan dalam menghadapi bencana. Metode adaptasi yang mengacu pada perubahan yang dilakukan sebagai akibat dari risiko lingkungan, merupakan hasil dari sikap atau perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dengan demikian, berikut merupakan strategi dalam mitigasi bencana oleh menurut (Fitriani et al., 2021) berupa :

a. Pemetaan

Mitigasi bencana di daerah rawan merupakan langkah awal dalam strategi mitigasi. Saat ini, peta bahaya telah dikembangkan oleh berbagai sektor. Para pengambil keputusan dapat memperoleh manfaat besar dari peta rawan bencana, terutama saat mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Namun, peta belum dioptimalkan hingga saat ini. Hal itu disebabkan karena:

1. Belum semua daerah di Indonesia dipetakan.
2. Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik.
3. Peta bencana belum terintegrasi.
4. Peta bencana yang dibuat dengan menggunakan peta dasar yang berbeda.

b. Pemantauan

Dengan menentukan tingkat kerentanan sejak dini, maka akan mudah menyelamatkan orang jika terjadi bencana. Beberapa daerah rawan bencana menjadi fokus pemantauan pelayanan kritis dan strategis serta sektor ekonomi.

c. Penyebaran Informasi

Poster dan leaflet tentang tata cara identifikasi, pencegahan dan penanggulangan bencana dibagikan kepada pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Penyebarluasan informasi terkait kebencanaan melalui media cetak dan elektronik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu daerah. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, koordinasi penyebaran informasi antar pemerintah daerah menjadi sangat penting.

d. Sosialisasi dan Konseling

Penyebarluasan segala informasi terkait kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat dengan tujuan akhir meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan bencana setiap saat. Hidup selaras dengan alam, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di daerah rawan bencana, serta cara bertahan hidup saat terjadi bencana merupakan pengetahuan penting bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

e. Pelatihan/Pendidikan

Jika terjadi bencana, dengan adanya pelatihan teknik penyelamatan sangatlah penting. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara petugas di lapangan, petugas teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat terkait pemulihan dan penyelamatan korban bencana. Kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana dikembangkan melalui pelatihan ini.

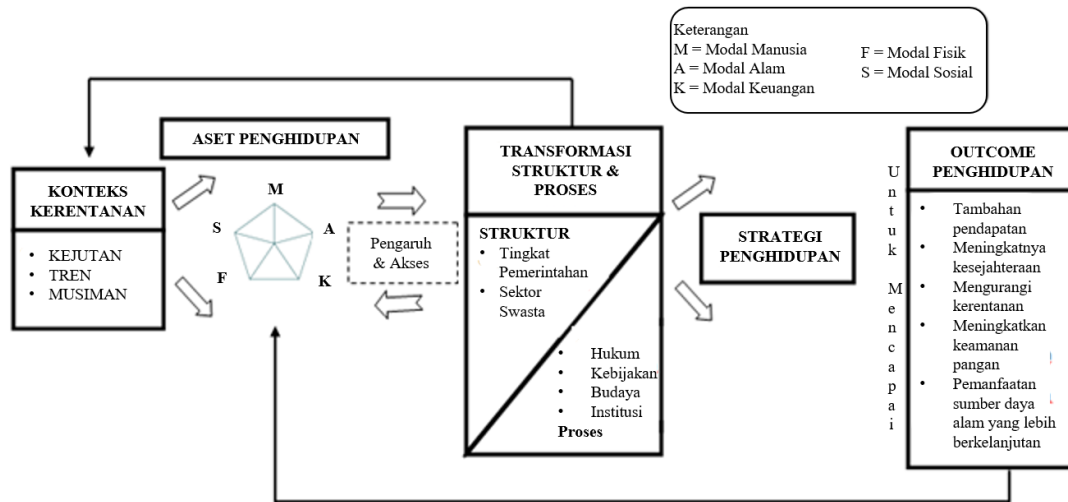
f. Peringatan dini

Peringatan dini bertujuan untuk mewaspadaikan tingkat aktivitas yang diamati secara terus-menerus di daerah rawan sehingga dapat dilakukan persiapan dini untuk

mengantisipasi bencana jika terjadi. Pemerintah daerah mendistribusikan peringatan dini kepada masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana. Hasil peringatan dini dan pemantauan daerah rawan bencana dapat berupa saran teknis berupa cara lain sementara atau permanen untuk pengalihan jalur jalan, pembongkaran dan/atau relokasi, dan rekomendasi penanganan lainnya.

Mitigasi bencana berbasis masyarakat merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari akibat bencana tersebut (Susanti, Arina, 2017). Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah penguatan kelembagaan, termasuk di sektor publik, korporasi, dan komunitas. Setiap budaya memiliki peran penting untuk mencegah bencana yang akan terjadi di lokasi tertentu. Penanggulangan bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan bahaya bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana dan/atau kerentanan individu yang menghadapi risiko (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kapasitas kelompok masyarakat adalah jumlah dari semua kekuatan yang ada, serta tindakan organisasi, sosial, atau lainnya yang dapat mengurangi dampak bahaya atau tragedi (Basabe, 2013). Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (*Development of International Development, DFID*) 1999 dapat digunakan untuk mengukur kapasitas di tingkat masyarakat.

Gambar 1.3 Kerangka Penghidupan Berkelanjutan



Sumber: Tjahjono, Heri And Suripin, Suripin And Kismartini, 2019

Kerangka Aksi Hyogo dapat digunakan untuk memeriksa tingkat ketahanan regional (HFA). HFA menguraikan lima langkah prioritas yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota untuk mengurangi risiko bencana. 22 indikator pencapaian yang mewakili lima prioritas aksi HFA telah dibuat. Pencapaian setiap indikator dinilai dalam skala dari 1 sampai 5, dan setiap indikator memiliki indeks minat yang ditetapkan. Indeks ketahanan keseluruhan terbesar suatu kawasan adalah 100 (Basabe, 2013). Berikut ini menjelaskan setiap prioritas tindakan dan indikator terkaitnya:

- 1) Prioritas Aksi 1: Menetapkan pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai prioritas utama di tingkat lokal dan nasional dengan landasan kelembagaan yang kuat. Ada 4 indikator berikut:
 - a. Ada sistem kebijakan dan undang-undang daerah yang terdesentralisasi untuk pengurangan risiko bencana, dengan kapasitas di semua tingkatan.
 - b. Pengerahan sumber daya yang spesifik dan memadai untuk melaksanakan inisiatif pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan.

- c. Mendelegasikan kontrol sumber daya ke tingkat lokal memastikan keterlibatan masyarakat dan desentralisasi.
 - d. Platform regional untuk pengurangan risiko bencana yang menjangkau berbagai sektor.
- 2. Prioritas Aksi 2: Mengidentifikasi, mendalami dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Ada empat indikator berikut:**
- a. Berdasarkan kerentanan data dan informasi bahaya, penilaian risiko lokal dan nasional dapat diakses dan mencakup penilaian risiko untuk sektor-sektor penting.
 - b. Ada sistem untuk melacak, menyimpan, dan berbagi informasi tentang risiko dan kelemahan penting.
 - c. Semua risiko utama memiliki sistem peringatan dini dengan cakupan masyarakat. Penilaian risiko di tingkat lokal dan nasional untuk manajemen risiko kolaborasi lintas batas dan regional untuk mempromosikan kerjasama pengurangan risiko regional.
- 3. Prioritas Aksi 3: Ciptakan budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan dengan menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan. Ada 4 indikator berikut:**
- a. Semua pemangku kepentingan memiliki akses dan mengetahui informasi terkait bencana (melalui jaringan pengembangan sistem berbagi informasi, dll.)
 - b. Konsep dan prosedur pemulihan risiko pencurian dan bencana dimasukkan dalam kurikulum sekolah, pendidikan terkait, dan materi pelatihan.
 - c. Teknik dan instrumen penelitian dibuat dan ditetapkan untuk analisis biaya, manfaat, dan multi risiko.

d. Kampanye kesadaran publik dilakukan untuk mempromosikan ketahanan budaya jika terjadi bencana, dengan menjangkau kelompok perkotaan dan pedesaan.

4. Prioritas Aksi 4: Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar. Terdapat 6 indikator sebagai berikut:

a. Pengurangan risiko bencana merupakan tujuan utama dari kebijakan dan program lingkungan, terutama untuk mengelola sumber daya alam, penggunaan lahan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

b. Strategi dan kebijakan pembangunan sosial menengah diterapkan untuk mengurangi kerentanan populasi yang paling rentan.

c. Strategi dan kebijakan sektoral telah diterapkan di sektor produksi dan ekonomi untuk mengurangi kerentanan operasi ekonomi.

d. Pengurangan risiko bencana termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia, dan ini termasuk penegakan peraturan bangunan dan izin untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat.

e. Proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana memasukkan inisiatif mitigasi risiko bencana.

f. Proses disiapkan untuk mengevaluasi konsekuensi risiko dari bencana besar.

5. Prioritas Aksi 5: Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat. Terdapat 4 indikator sebagai berikut:

a. Terdapat kapasitas dan proses kelembagaan, teknis, dan kelembagaan yang kuat untuk mengelola risiko bencana dengan fokus pada pengurangan risiko bencana yang tersedia dan siap

- b. Semua tingkat pemerintahan memiliki kesiapsiagaan bencana dan rencana kontinjensi yang tersedia dan siap, dan sering dilakukan latihan untuk menguji dan mengembangkan operasi tanggap bencana.
- c. Ada cadangan keuangan dan rencana kesiapsiagaan, siap membantu respons dan pemulihan yang efisien bila diperlukan.
- d. Ada prosedur dan kesiapan untuk mengkomunikasikan informasi terkait ancaman dan bencana serta melakukan tinjauan setelah terjadi insiden.

Selanjutnya, menurut Zulfiar dalam jurnal yang dikutip oleh (Kodar, 2020) sebagai tindakan preventif atau penanggulangan bencana, identifikasi bencana diperlukan untuk mitigasi bencana. Selain itu, identifikasi bencana merupakan komponen kesiapsiagaan bencana. Faktor penting dalam menentukan kemungkinan bencana alam tersebut adalah lingkungan atau lokasi cagar budaya. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kerentanan setelah menentukan jenis bencana yang terjadi. Kelemahan cagar budaya dalam menghadapi bencana yang akan datang adalah kerentanan. Kerentanan dalam konteks ini terkait dengan bencana yang rentan juga. Ada sejumlah besar warisan budaya yang beragam secara ekologis dan tersebar secara geografis, beberapa di antaranya dapat ditemukan di perairan, di sepanjang pantai, di pegunungan, lembah, kota, dan bahkan di wilayah yang terletak di antara negara. Kerentanan sebagai warisan budaya dipengaruhi oleh topografi, distribusi lahan, dan urbanisasi. Dari kerentanan dan kerawanan lokasi cagar budaya, kita dapat belajar tentang budaya dari data yang disediakan oleh pihak swasta dan lembaga pemerintah. Peta geografis, peta tanah, peta tempat rawan gempa, peta tempat rawan longsor, peta tempat rawan gunung berapi, peta tempat rawan tsunami, peta tempat rawan banjir, dan peta wilayah lainnya tempat-tempat yang berisiko bencana adalah contoh dari data yang ada.

Dengan adanya kerentanan tersebut, diperlukan upaya kegiatan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat Gunungkidul. Menurut (Badrujamaludin et al., 2021) kegiatan yang dilakukan dapat dengan cara berupa penyuluhan berupa kesiapsiagaan yang disertai dengan demonstrasi dan simulasi kesiapsiagaan dengan berbagai tahap, dimulai dari prabencana, intrabencana sampai paska bencana. Kegiatan ini dapat membuat masyarakat mengerti bagaimana gambaran bencana yang mendekati nyata, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dalam berbagai bencana.

Konsep dasar dari mitigasi bencana berbasis masyarakat menurut (Salahuddin, 2019) adalah upaya untuk mengurangi kerentanan masyarakat atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Bencana besar adalah puncak dari banyak bahaya dan sejumlah kerentanan sosial. Rantai kerentanan ini meliputi kemiskinan tanpa mempertimbangkan kondisi alam yang membuat masyarakat rentan, tidak berdaya, dan tunduk pada berbagai tekanan dinamis. Kerentanan suatu kelompok masyarakat terhadap masyarakat lain memiliki akar penyebab yang berbeda begitu juga dengan jenis bahayanya yang berbeda satu sama lain.

Tujuan dari mitigasi bencana berbasis masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan kesiap-siagaan masyarakat, terutama daerah-daerah yang rawan bencana.
2. Memperkenalkan cara membuat peta bahaya setempat.
3. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
4. Mengembangkan organisasi bencana di daerah.
5. Memperkaya pengetahuan masyarakat dengan pendidikan tentang bencana.
6. Mempertinggi kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup.

Teori yang dikemukakan oleh Benyamin Blum tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat (Manghayu, 2017) mengatakan bahwa Tindakan seseorang dibentuk oleh pengetahuan atau domain kognitif mereka. Dijelaskan didalam teori tersebut bahwa sikap atau perilaku merupakan faktor terbesar setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi individu atau masyarakat. Karena sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi, maka sikap merupakan faktor penentu dalam perilaku. Komponen emosional, komponen kognitif (persepsi, pendapat, dan keyakinan), dan perilaku selalu berkaitan dengan sikap.

Memanfaatkan kearifan lokal untuk mengelola peristiwa tanggap darurat bencana, pasca rekonstruksi atau rehabilitasi. Membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi risiko bencana yang harus segera dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan penanggulangan bencana atau melalui simulasi yang dapat membuat masyarakat lebih mengetahui bagaimana mengelola risiko.

Menurut Anthoni (Aritonang, 2023) menyatakan bahwa Mitigasi berbasis masyarakat memerlukan pembentukan tim desa tanggap bencana yang mengacu pada proses pembentukan sebuah tim di tingkat desa dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam atau kejadian yang mengganggu. Tim ini dilatih dan disiapkan untuk merespons dengan cepat dalam situasi darurat dan bencana, dengan fokus pada dua hal utama: edukasi dan peningkatan keterampilan anggota tim. Konsep yang dilakukan sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana melakukan persiapan untuk menjalankan suatu kegiatan. Mereka melakukan beberapa langkah, seperti melakukan survey dan observasi di lapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan kejadian atau situasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Ini bisa mencakup memahami kondisi

- lapangan, mengidentifikasi kebutuhan, menilai risiko, atau mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan dengan lebih efektif.
2. Melakukan sosialisasi tentang pembentukan Tim Destana (Tim Desa Tangguh Bencana) serta edukasi tentang mitigasi bencana yang melibatkan partisipasi masyarakat di Desa Wisata. Kegiatan ini melibatkan pihak pemerintah desa, tim Destana yang diajukan untuk dikukuhkan, dan 30 peserta dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor aktivitas peserta selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pembentukan Tim Destana, cara mengelola bencana, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana di Desa Wisata tersebut.
 3. Evaluasi keberhasilan suatu kegiatan dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, evaluasi dilakukan melalui pengukuhan tim Destana oleh institusi yang berkepentingan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap berhasil jika tim Destana resmi diakui atau diukuhkan oleh lembaga yang relevan. Selanjutnya, evaluasi juga dilakukan terhadap kemampuan peserta dan tim Destana dalam meminimalisir kerawanan bencana serta menangani risiko-risiko yang terkait dengan bencana. Hal ini dievaluasi melalui jawaban peserta terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan. Jadi, jika peserta dan tim Destana mampu memberikan jawaban yang tepat terkait strategi meminimalisir kerawanan dan menangani risiko bencana, itu menandakan keberhasilan dalam edukasi mereka. Terakhir, evaluasi juga dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh 25 peserta kegiatan terkait edukasi tentang prosedur

penanggulangan bencana. Dengan cara ini, tim pelaksana dapat mengumpulkan umpan balik langsung dari peserta untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka tentang prosedur penanggulangan bencana telah terbentuk dan sejauh mana efektivitas edukasi yang telah dilakukan.

1.6.2 Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu cara agar atraksi, penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya diintegrasikan ke dalam struktur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan praktik dan kebiasaan saat ini (Rosa, Radia, Sri, Wilda, 2016). Selanjutnya menurut Mulyadin yang dikutip oleh (Rosa, Radia, Sri, Wilda, 2016) mengatakan bahwa desa wisata adalah kawasan pedesaan dengan suasana yang sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari desa, serta arsitektur bangunan dan tata ruang yang unik dan menarik, serta kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik yang berpotensi untuk berkembang menjadi atraksi, penginapan, makanan dan minuman, souvenir, dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut Hadi dalam jurnal yang dikutip oleh (Kusuma et al., 2022) Desa wisata dianggap sebagai kebutuhan manusia untuk mengurangi stres, kelelahan, dan masalah. Jenis pariwisata berkembang berdasarkan berbagai faktor, termasuk preferensi individu, motivasi, tren, dan persyaratan. Selain faktor-faktor tersebut, pariwisata konvensional yang memberikan dampak negatif yang signifikan dan wisata konvensional yang cenderung bersifat massif. Transformasi wisata massal menjadi bentuk wisata alternatif membantu desa wisata mengembangkan potensi wisata yang lebih beragam. Hal utama tentang desa wisata adalah kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan wisatawan dapat menikmati berbagai produk di desa.

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi penginapan, tempat wisata, dan sarana pendukung pariwisata lainnya karena karakteristik sosial

ekonomi dan lingkungannya. Tradisional dan budaya, serta lingkungan dan alam, desa wisata dapat dijadikan tujuan wisata (Siti Al Zyanasya & Indratno, 2022). Serta menurut strategi Chandler, alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya adalah strategi penguatan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat (Purwanti, 2019).

Menurut (Sunarjaya et al., 2018) Desa wisata yang aman bencana yaitu dengan adanya peran pemerintah serta dari *stakeholder* lainnya yang ikut membantu mempromosikan dan penyediaan sarana dan prasarana terkait keamanan dari bencana seperti peta rawan bencana, infrastruktur yang mendukung. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan, khususnya Desa Wisata, sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata. Ketiga, lingkungan harus dijaga kebersihannya dan peralihan tata ruang harus dihentikan oleh perangkat desa dan masyarakat agar keindahan dan kenyamanan desa wisata tetap terjaga.

Menurut Darsono dalam jurnal yang dikutip oleh (Mumtaz & Karmilah, 2022) Konsep pengembangan kawasan pedesaan yang dikenal dengan sebutan “Desa Wisata” mengedepankan keaslian melalui aspek adat istiadat, sosial budaya, arsitektur tradisional, kehidupan sehari-hari, dan tata ruang desa dalam satu kesatuan komponen wisata yang meliputi atraksi, penginapan, dan fasilitas pendukung.

Menurut Tanjung (Tanjung et al., 2021) konsep "Desa Tangguh Bencana" merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana. Program ini sejalan dengan strategi yang diutamakan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014, seperti penanggulangan bencana berbasis masyarakat, meningkatkan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, serta mengintegrasikan program pengurangan risiko ke dalam rencana

pembangunan. Desa Tangguh Bencana tidak hanya mencakup aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008, tetapi juga melibatkan penyatuan inisiatif masyarakat dalam mengurangi risiko bencana ke dalam proses pembangunan daerah. Ini mencakup pemberdayaan masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana, serta mengintegrasikan pemikiran ini ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Mitigasi bencana berbasis masyarakat merupakan upaya untuk mengurangi dampak bencana mulai dari segi pembangunan maupun dari kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

1.7.2 Desa Wisata

Desa Wisata merupakan desa sebagai tempat berlibur dengan mengintegrasikan praktik dan adat kehidupan masyarakat desa dengan daya tarik wisata alam dan budaya, pelayanan fasilitas wisata umum, dan aksesibilitas yang memadai.

1.8 Definisi Operasional

Menurut *Hyogo Framework for Action* (HFA) terdapat 5 prioritas utama sebagai aksi untuk mengurangi resiko bencana yang relevan dengan penelitian ini. Dari 5 prioritas utama tersebut akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

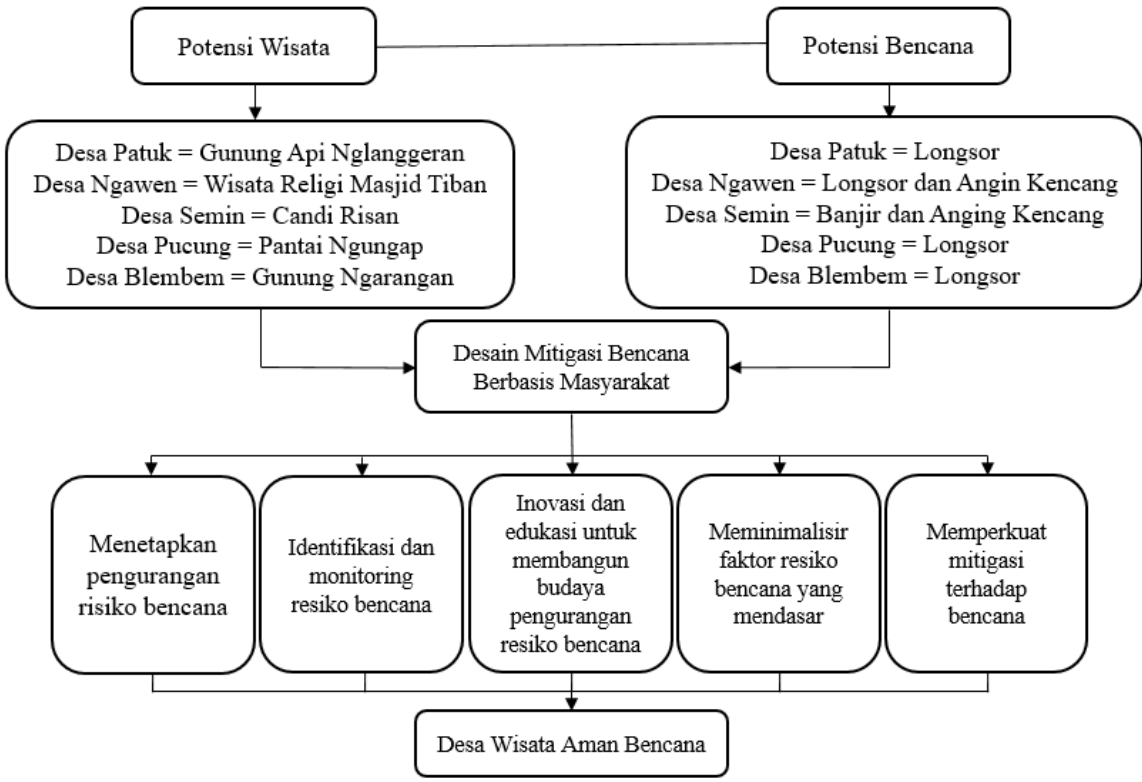
Variabel	Indikator	Parameter
Mitigasi bencana berbasis masyarakat di desa wisata	Menetapkan pengurangan risiko bencana	a. BPBD Gunungkidul membuat kebijakan lokal untuk mengurangi resiko bencana di desa wisata

		<ul style="list-style-type: none"> b. BPBD Gunungkidul melakukan pemetaan alokasi khusus untuk pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana di desa wisata c. BPBD Gunungkidul membuat platform daerah untuk mengurangi resiko bencana di desa wisata
	<p>Mengidentifikasi, mendalami dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. BPBD Gunungkidul melakukan penilaian terhadap resiko bencana dan informasi kerentanan bencana di desa wisata b. BPBD Gunungkidul membuat sistem pemantauan, pengarsipan, dan publikasi data resiko bencana di desa wisata c. BPBD Gunungkidul membuat sistem peringatan dini yang menjangkau masyarakat di desa wisata
	<p>Ciptakan budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan dengan menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. BPBD Gunungkidul memberikan informasi aktual terkait bencana dan dapat diakses ke seluruh masyarakat di desa wisata b. BPBD Gunungkidul memberikan edukasi kurikulum di jenjang pendidikan yang memuat konsep dan praktik pengurangan resiko bencana c. BPBD Gunungkidul membuat Strategi dalam membangun kesadaran masyarakat di desa wisata
	<p>Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. BPBD Gunungkidul membuat kebijakan sektor ekonomi untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas perekonomian di desa wisata b. BPBD Gunungkidul membuat perencanaan dan pengelolaan pemukiman dengan unsur

		<p>pengurangan resiko bencana di desa wisata</p> <p>c. BPBD Gunungkidul membuat tahapan pengurangan resiko bencana dari rehabilitasi hingga pemulihan pasca bencana di desa wisata</p> <p>d. BPBD Gunungkidul membuat prosedur terhadap dampak resiko bencana untuk proyek pembangunan infrastruktur di desa wisata</p>
	<p>Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkat.</p>	<p>a. BPBD Gunungkidul membuat kebijakan dan mekanisme untuk manajemen resiko bencana di desa wisata</p> <p>b. BPBD Gunungkidul membuat planning siap siaga bencana di semua lini pemerintahan di desa wisata</p> <p>c. BPBD Gunungkidul membuat cadangan finansial dan mekanisme antisipasi resiko bencana di desa wisata</p> <p>d. BPBD Gunungkidul membuat prosedur untuk aktivitas informasi yang relevan selama bahaya dan bencana di desa wisata</p>

1.9 Kerangka Berfikir

Gambar 1.4 Bagan Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Penulis (2023)

Kerangka berfikir diatas menjelaskan hubungan antar variabel pada penelitian ini. Desa sebagai objek utama yang memiliki potensi wisata dan potensi bencana. Pengembangan potensi wisata ini menghasilkan Desa Wisata Gluntung, Ngawen, Semin, Pucung & Blembem. Selain memiliki potensi wisata, Kelima Desa tersebut berada di daerah rawan bencana. Konsep Mitigasi Bencana berbasis masyarakat diterapkan di Desa Wisata Gluntung, Ngawen, Semin, Pucung & Blembem. Dengan adanya potensi bencana diperlukan pengembangan Desa Wisata aman bencana yang mewujudkan Desa Wisata aman dari bencana.

1.10 Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014) metode penelitian secara umum adalah mendapatkan data dengan tujuan tertentu untuk dikembangkan dan dibuktikan dengan ditemukannya sebuah teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Maka

pada penelitian ini memilih jenis kualitatif karena digunakan untuk menjelaskan tujuan penelitian, selain itu jenis kualitatif juga memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini dikarenakan pendekatan studi kasus memiliki keterkaitan dengan adanya masalah yang di teliti. Menurut Yin dalam jurnal yang dikutip oleh (Nur'aini, 2020) Penelitian studi kasus adalah pendekatan terbaik untuk mengatasi pertanyaan penelitian utama tentang bagaimana atau mengapa, seberapa sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang sedang dipelajari, dan fokus penelitian adalah fenomena kontemporer untuk melacak peristiwa kontemporer. Ketika sampai pada metode studi kasus, peneliti berkonsentrasi pada desain dan implementasi penelitian. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam konteks mitigasi bencana berbasis masyarakat dalam meningkatkan desa wisata aman bencana.

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode kualitatif. Namun dalam pengertiannya, Penelitian kualitatif menurut Danzel & Lincoln dalam (Fadli, 2021) adalah penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Oleh karena itu, Menurut (Fadli, 2021) penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada deskripsi holistik, yang bias menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga menggunakan Metode deskriptif-kualitatif yang mana berguna untuk memberikan desain mengenai peningkatan keamanan desa wisata terhadap bencana. Data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung oleh narasumber. Dari hal tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat meneliti bagaimana desain mitigasi

bencana untuk jangka panjang di desa wisata yang dilakukan oleh BPBD Gunungkidul dengan wawancara dan juga dokumentasi sebagai data pendukung.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunungkidul di Jl. Siraman Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Alasan peneliti memilih lokasi ini untuk meningkatkan keamanan desa wisata di Gunungkidul yang rawan bencana. Selain itu penelitian ini dilakukan di 5 desa wisata yaitu desa semin, patuk, ngawen, pucung dan blembem. Alasan peneliti memilih lokasi di 5 desa ini karena bencana yang terjadi ditahun 2022 cukup merugikan.

1.9.3 Jenis Data

Dalam Penelitian ini digunakan dua jenis data, yakni Data Primer dan Data Sekunder.

1.9.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari kegiatan observasi maupun wawancara dilokasi penelitian secara lebih mendalam. Data primer ini didapatkan langsung dari narasumber yang berhubungan terkait keamanan desa wisata terhadap bencana sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat untuk memperkuat dalam pembuatan proposal ini. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan di BPBD Gunungkidul.

1.9.3.2 Data Sekunder

Untuk melengkapi sebuah data primer, data sekunder diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang peneliti tidak kumpulkan sendiri, dan data sekunder biasanya terdiri dari dokumentasi data yang berasal dari sumber tidak langsung seperti majalah, informasi, atau

publikasi lainnya. Data sekunder biasanya berupa berita online yang terpercaya dan kredibel seperti bpbk.go.id, bnpb.go.id, detik.com, dan bpbk.gunungkidulkab.go.id, bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen atau arsip, website dan media sosial BPBD Kabupaten Gunungkidul.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, dengan adanya teknik pengumpulan data, informasi data yang diambil dapat disimpulkan secara jelas dan rinci. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam jurnal yang dikutip oleh (Wijoyo, 2020) merupakan mempertemukan dua orang untuk sesi tanya jawab untuk bertukar informasi dan ide tentang topik tertentu untuk membangun makna. Sehingga hasil yang didapat bias dijadikan kesimpulan. Dengan wawancara ini peneliti mendapatkan bahan untuk penulisan. Tabel berikut akan menampilkan narasumber wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 1.4 Narasumber

Narasumber	Peran	Alasan	Tema Wawancara	Pembahasan
Agus Wibawa Arifianto, ST, M.Eng.	Sub. Kor. Bidang Pencegahan	Memiliki banyak informasi dibidang kebencanaan	Kebijakan Penanggulangan Bencana BPBD Gunungkidul	Penjelasan bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan oleh BPBD
Sudjarwono, SH	Sub. Kor. Kelembagaan	Memiliki banyak informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Dinas	Penjelasan bagaimana proses

		dibidang pariwisata	Pariwisata Gunungkidul	perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
Sugianto	Warga Desa Wisata Semin	Tokoh masyarakat yang terdampak bencana	Potensi Wisata dan Mitigasi Bencana	
Kasiran	Dukuh Desa Wisata Patuk	Tokoh masyarakat yang terdampak bencana	Potensi Wisata dan Mitigasi Bencana	
Rubimin	Warga Desa Wisata Ngawen	Mengetahui kebencanaan yang ada didaerahnya	Potensi Wisata dan Mitigasi Bencana	
Ragil	Warga Desa Wisata Pucung	Tokoh masyarakat yang terdampak bencana	Potensi Wisata dan Mitigasi Bencana	
Hidayat	Warga Desa Wisata Blembem	Pemuda yang pernah menjadi relawan	Potensi Wisata dan Mitigasi Bencana	

Sumber : diolah penulis (2023)

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono dalam jurnal yang dikutip oleh (Benny et al., 2021) merupakan catatan peristiwa yang sudah lewat berupa foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi sendiri merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Adanya dokumentasi bertujuan sebagai pendukung peneliti mengenai hasil penelitian.

1.9.5 Teknik Analisis Data

(Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. Reduksi Data

Klasifikasi dan penyederhanaan data untuk menghasilkan data dari penelitian yang dilakukan sebelumnya disebut sebagai reduksi data. Reduksi data ini dilakukan saat pengumpulan data yang diperoleh peneliti yang dilakukan secara langsung. Sebagai tahapan analisis data, reduksi data bertujuan untuk menghasilkan informasi yang memudahkan dalam menarik kesimpulan dari data. Data yang direduksi selama proses reduksi data memberikan gambaran yang lebih konkrit dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubbag Umum Kepegwaan dan Aset, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Tanggap Darurat Evaluasi dan Penyelamatan, Kabid Kedaruratan Logistik, dan Masyarakat kemudian akan diolah dari wawancara menjadi “transkrip” sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data-data yang sudah terkumpul, dipilih dan dipilah sesuai indicator atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, data kualitatif disajikan bersama deskripsi singkat yang disusun untuk membantu peneliti memahami masalah yang sedang diselidiki. Peneliti menggunakan deskripsi dan data yang diperoleh menyajikan data. Data-data yang telah disusun sesuai kategori akan dipilih dan dipilah kemudian diurutkan untuk mendapatkan data yang berguna serta sesuai dengan analisis model komunikasi BPBD kabupaten Gunungkidul dalam penanggulangan bencana alam. Selanjutnya, menghubungkan variable atau indicator dengan variable indicator lainnya. Sehingga dapat diperoleh model komunikasi BPBD kabupaten Gunungkidul dalam penanggulangan bencana alam di desa wisata. Data yang dihubungkan harus sesuai dengan indicator penemuan fakta (*fact finding*), perencanaan (*planning*), komunikasi (*communication*), dan evaluasi (*evaluation*).

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan data-data yang mencakup pemberian makna dari data yang diperoleh dan secara garis besar penarikan kesimpulan harus mencakup informasi yang penting untuk bisa dipahami dan tidak mengandung bahasa yang berbelit-belit. Kesimpulan juga bisa berisi saran atau masukan kepada BPBD kabupaten Gunungkidul mengkomunikasikan informasi bencana alam dalam menanggulangi bencana alam.